



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2026**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kaupaten Tapin Tahun 2026 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renja ini.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2026 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupeten Tapin Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2026 ini masih belum sempurna, segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Tapin menyusun Dokumen Rancangan Renja 2026 yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tapin.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Inspektorat Kabupaten Tapin membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan Inspektorat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tapin dapat berperan secara optimal membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Tapin.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tapin yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Tapin No. 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
 4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja



- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

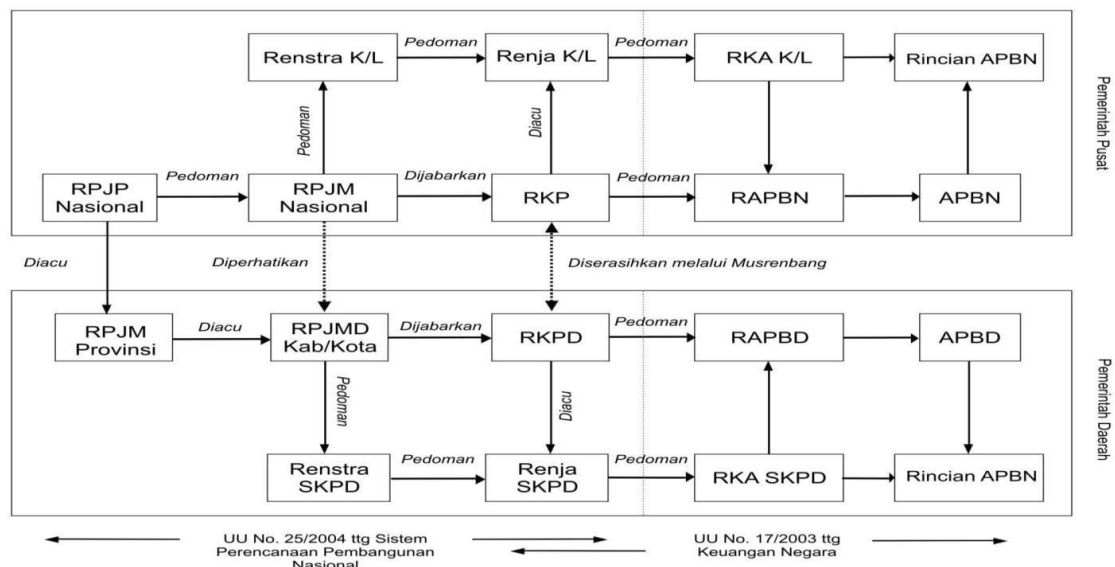
- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

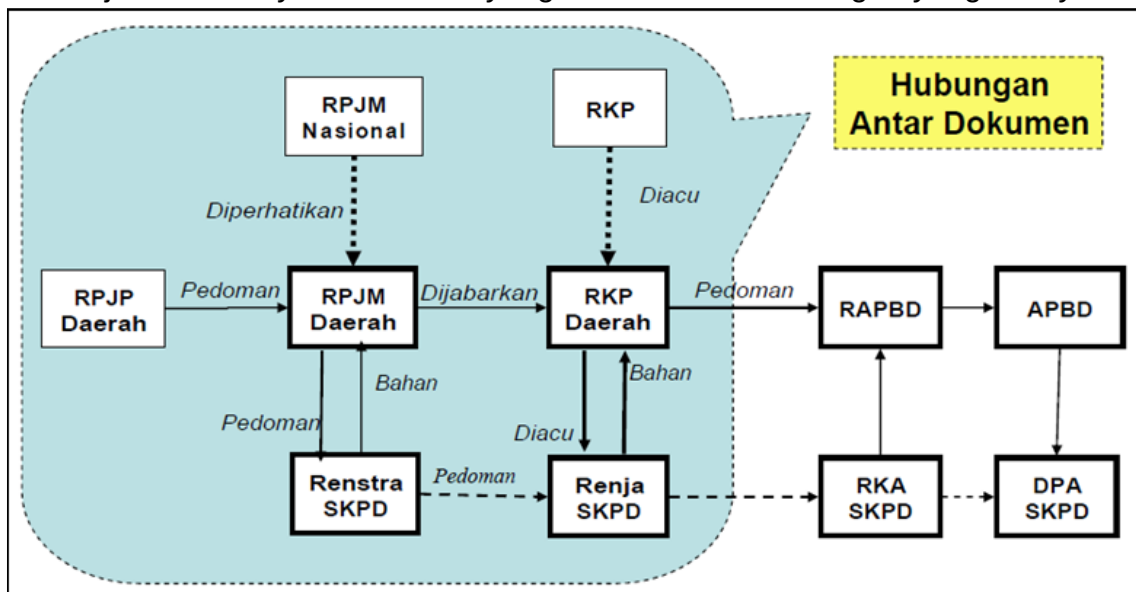
f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2026 SOPD Inspektorat sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan



- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender DI Daerah;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 41. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 42. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 43. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);



- 46.39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi



- pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
56. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 57. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 58. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
 59. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 60. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan).
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 5);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
 64. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
 65. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
 66. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;



- 67. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026;
- 68. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Renja Inspektorat Kabupaten Tapin adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan dari penyusunan Renja 2026, yaitu:

- 1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Inspektorat;
- 2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Inspektorat;
- 3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SOPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
- 4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PD Inspektorat dan Kabupaten Tapin tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2025



BAB III TUJUAN, SASARAN OPD

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang: Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SOPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SOPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan capaian tahun berjalan triwulan II (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2024) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

Nihil

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:

Nihil



Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:



FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA
Renja SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin
Triwulan IV Tahun 2024

No.	Kode Anggaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome Y Kegiatan (output)	Target Rencana SKPD pada Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Tahun												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s/d Tahun 2024		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.								
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		I			II			III			IV			12 = 8+9+10+11				13 = 8+9+10+11		14 = 6+12				15 = 10+11+10+12											
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11				13 = 8+9+10+11		14 = 6+12				15 = 10+11+10+12		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
6	01			URUSAN PENWAKSANAAN USRAN PEMERINTAHAN																																			
6	01			INSPEKTORAT DAERAH																																			
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG USRAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Kapabilitas APIP	3	Level	16.732.077.627	3	Level	16.732.077.627		Level	2.668.144.444			7.073.242.123			10.049.364.960	3	Level	13.652.197.022	3,00	Level	13.652.197.022	100,00	81,59	3,00	Level	13.652.197.022	100,00	81,59	Sekr					
					Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	82	Nilai		82	Nilai							80,0	Nilai		80,00	Nilai		98,66		80,00	Nilai		98,66						Sekr					
					Persentase APIP yang sesuai kompetensi	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%					100	%		100,00			100	%				100,00			Sekr	
					Nilai SAKIP Inspektorat	BB	Kategori		BB	Kategori		A	Kategori											A	Kategori		100,00			A	Kategori		100,00				Sekr		
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100	%	4.212.000	100	%	4.212.000	100	%						1.884.650			2.802.150	100,00	%	2.802.150	100,00	66,53	100,00	%	2.802.150	100,00	66,53	Perencanaan						
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	Dok	656.000	2	Dok	656.000		Dok				1	Dok	384.600	1	Dok	384.600	2,00	Dok	384.600	100,00	58,63	2,00	Dok	384.600	100,00	58,63	Perencanaan					
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dok	656.000	1	Dok	656.000		Dok				1	Dok	435.350			435.350	1,00	Dok	435.350	100,00	66,36	1,00	Dok	435.350	100,00	66,36	Perencanaan					
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	Dok	656.000	1	Dok	656.000		Dok					Dok		1	Dok	610.000	1,00	Dok	610.000	100,00	92,99	1,00	Dok	610.000	100,00	92,99	Perencanaan					
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	Dok	396.000	1	Dok	396.000		Dok				1	Dok	187.200			187.200	1,00	Dok	187.200	100,00	47,27	1,00	Dok	187.200	100,00	47,27	Perencanaan					
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	Dok	396.000	1	Dok	396.000		Dok				1	Dok	183.000			320.500	1,00	Dok	320.500	100,00	80,93	1,00	Dok	320.500	100,00	80,93	Perencanaan					
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	2	Lap	856.000	2	Lap	856.000	1	Lap			2	Lap	519.000			519.000	2,00	Lap	519.000	100,00	60,63	2,00	Lap	519.000	100,00	60,63	Perencanaan						
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4	Lap	596.000	4	Lap	596.000	1	Lap		1	Lap		1	Lap	175.500	1	Lap	345.500	4,00	Lap	345.500	100,00	57,97	4,00	Lap	345.500	100,00	57,97	Perencanaan				
																								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)				100,00	66,53					100,00	66,53				
																								Predikat Kinerja Sub Kegiatan				ST	S					ST	S				
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	%	8.960.150.558	100	%	8.960.150.558	100	%	2.169.246.307	100	%	4.992.805.879	100	%	6.843.446.665	100	%	8.442.761.991	100	%	8.442.761.991	100,00	94,23	100,00	%	8.442.761.991	100,00	94,23	Adum					
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Org	8.837.168.558	38	Org	8.837.168.558	38	Org	2.153.946.307	38	Org	4.955.305.879	38	Org	6.764.852.965	38	Org	8.361.228.791	38	Org	8.361.228.791	100,00	94,61	38,00	Org	8.361.228.791	100,00	94,61	Adum				
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	109.930.000	12	Dok	109.930.000	3	Dok	15.300.000	6	Dok	37.500.000	9	Dok	69.324.300	12	Dok	69.324.300	12	Dok	69.324.300	100,00	63,06	12,00	Dok	69.324.300	100,00	63,06	Adum				
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1	Lap	4.995.000	1	Lap	4.995.000	1	Lap				Lap	4.809.050			4.809.050	1	Lap	4.809.050	100,00	96,28	1,00	Lap	4.809.050	100,00	96,28	Adum						
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	3.262.000	1	Dok	3.262.000		Dok				Dok		1	Dok	2.939.500	1	Dok	2.939.500	100,00	90,11	1,00	Dok	2.939.500	100,00	90,11	Adum						
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan	1	Dok	4.795.000	1	Dok	4.795.000		Dok				1	Dok	4.460.350			4.460.350	1	Dok	4.460.350	100,00	93,02	1,00	Dok	4.460.350	100,00	93,02	Adum					
																								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)				100,00	94,23					100,00	94,23				
																								Predikat Kinerja Sub Kegiatan				ST	ST					ST	ST				
6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	2.235.200	100	%	2.235.200		%		100	%	445.000	100	%	445.000	100	%	2.211.000	100	%	2.211.000	100,00	98,92	100	%	2.211.000	100,00	98,92	Adum					
6	01	01	2.05	06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	2.235.200	1	Lap	2.235.200		Lap		1	Lap	445.000					2.211.000	1	Lap	2.211.000	100,00	98,92	1	Lap	2.211.000	100,00	98,92	Adum					
																								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)				100,00	98,92					100,00	98,92				
																								Predikat Kinerja Sub Kegiatan				ST	ST					ST	ST				

6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	%	1.029.722.195	100	%	1.029.722.195	100	%	54.850.000	100	%	177.975.000	00	%	236.450.000	100	%	435.627.100	100	%	435.627.100	100,00	42,31	00	Bln	435.627.100	100,00	42,31	Adum		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38	Paket	72.619.755	38	Paket	72.619.755		Paket						38	Paket	27.000.000	38	Paket	27.000.000	100,00	37,18	38	Paket	27.000.000	100,00	37,18	Adum			
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	38	Dok	87.278.400	38	Dok	87.278.400	38	Dok	13.800.000	38	Dok	41.400.000	38	Dok	55.500.000	38	Dok	83.897.300	38	Dok	83.897.300	100,00	96,13	38	Dok	83.897.300	100,00	96,13	Adum	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38	Org	413.682.800	38	Org	413.682.800	7	Org	17.800.000	12	Org	63.975.000	15	Org	75.475.000	38	Org	172.204.800	38	Org	172.204.800	100,00	41,63	38	Org	172.204.800	100,00	41,63	Adum	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38	Org	456.141.240	38	Org	456.141.240	5	Org	23.250.000	31	Org	72.600.000	32	Org	105.475.000	38	Org	152.525.000	38	Org	152.525.000	100,00	33,44	38	Org	152.525.000	100,00	33,44	Adum	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	42,31					100,00	42,31	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	SR					ST	SR	
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100	%	4.102.090.660	100	%	4.102.090.660	100	%	388.767.427	100	%	1.731.038.896	100	%	2.703.435.158	100	%	3.017.240.976	100	%	3.017.240.976,00	100,00	73,55	100,00	%	3.017.240.976	100,00	73,55	Adum		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	39.056.100	2	Paket	39.056.100	1	Paket	661.000		Paket	1.453.500		Paket	2.758.500	1	Paket	13.952.100	2	Paket	13.952.100,00	100,00	35,72	2	Paket	13.952.100	100,00	35,72	Adum	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	105.440.100	12	Paket	105.440.100	3	Paket	1.000.000	6	Paket	17.369.887	9	Paket	39.069.637	12	Paket	85.091.979	12	Paket	85.091.979,00	100,00	80,70	12	Paket	85.091.979	100,00	80,70	Adum	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	Paket	10.610.100	12	Paket	10.610.100	3	Paket	433.620	6	Paket	4.108.000	9	Paket	4.108.000	12	Paket	8.946.900	12	Paket	8.946.900,00	100,00	84,32	12	Paket	8.946.900	100,00	84,32	Adum	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	271.589.560	12	Paket	271.589.560	3	Paket	28.683.235	6	Paket	67.149.435	9	Paket	101.140.935	12	Paket	204.718.990	12	Paket	204.718.990,00	100,00	75,38	12	Paket	204.718.990	100,00	75,38	Adum	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	72.869.000	12	Paket	72.869.000	3	Paket	2.159.500	6	Paket	16.843.900	9	Paket	21.828.650	12	Paket	44.642.300	12	Paket	44.642.300,00	100,00	61,26	12	Paket	44.642.300	100,00	61,26	Adum	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lap	44.540.000	12	Lap	44.540.000	3	Lap	5.545.200	6	Lap	13.708.900	9	Lap	23.212.900	12	Lap	44.388.000	12	Lap	44.388.000,00	100,00	99,66	12	Lap	44.388.000	100,00	99,66	Adum	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	3.287.865.800	12	Lap	3.287.865.800	3	Lap	175.142.436	6	Lap	805.202.637	9	Lap	1.255.658.268	12	Lap	2.580.481.007	12	Lap	2.580.481.007,00	100,00	78,48	12	Lap	2.580.481.007	100,00	78,48	Adum	
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dok	270.120.000	12	Dok	270.120.000	3	Lap	175.142.436	6	Lap	805.202.637	9	Lap	1.255.658.268	12	Lap	35.019.700	12	Lap	35.019.700,00	100,00	12,96	12	Lap	35.019.700	100,00	12,96	Adum	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	73,55					100,00	73,55	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	S					ST	S	
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100	%	1.723.514.756	100	%	1.723.514.756		%								100	%	1.294.274.000	100	%	1.294.274.000,00	100,00	75,10	100	%	1.294.274.000,00	100,00	75,10	Adum		
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	766.000.000	4	Unit										4	Unit	424.764.000	4	Unit	424.764.000,00	100,00	55,45								
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		Paket		0	Paket			Paket											0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Adum			
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	90	Unit	957.514.756	90	Unit	957.514.756		Unit							90	Unit	869.510.000	90	Unit	869.510.000,00	100,00	90,81	90	Unit	869.510.000,00	100,00	90,81	Adum		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	75,10					100,00	75,10	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	S					ST	S	
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	265.386.510	100	%	265.386.510	100	%	30.489.283	100	%	72.618.028	100	%	98.403.140	100	%	151.428.145	100	%	151.428.145	100,00	57,06	100	%	151.428.145	100,00	57,06	Adum		
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	201.315.010	12	Lap	201.315.010	3	Lap	21.061.603	6	Lap	44.364.148	9	Lap	60.741.020	12	Lap	87.799.545	12	Lap	87.799.545	100,00	43,61	12	Lap	87.799.545	100,00	43,61	Adum	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	64.071.500	12	Lap	64.071.500	3	Lap	9.427.680	6	Lap	28.253.880	9	Lap	37.662.120	12	Lap	63.628.600	12	Lap	63.628.600	100,00	99,31	12	Lap	63.628.600	100,00	99,31	Adum	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	57,06					100,00	57,06	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	R					ST	R	
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100	%	644.765.748	100	%	644.765.748	90,13	%	24.791.427	90,13	%	98.359.320	90,13	%	165.300.347	90,13	%	305.851.660	90,13	%	305.851.660	90,13	47,44	90,13	%	305.851.660	90,13	47,44	Adum		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pemerintah Daerah	1	Unit	195.081.855	1	Unit	195.081.855	1	Unit	9.364.633	1	Unit	33.131.463	1	Unit	58.155.813	1	Unit	76.582.213	1	Unit	58.155.813	100,00	29,81	12	Unit	58.155.813	12,00	29,81	Adum	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	239.896.600	10	Unit	239.896.600	3	Unit	10.176.924	6	Unit	45.619.407	9	Unit	80.169.956	10	Unit	148.432.880	10	Unit	80.169.956	100,00	33,42	10	Unit	80.169.956	10,00	33,42	Adum	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	37.759.201	80	Unit	37.759.201	20	Unit	4.139.870	40	Unit	17.979.450	60	Unit	24.143.578	80	Unit	29.341.867	80	Unit	24.143.578	100,00	63,94	80	Unit	24.143.578	80,00	63,94	Adum	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	172.028.092	1	Unit	172.028.092	1	Unit	1.110.000	1	Unit	1.629.000	1	Unit	2.831.000	1	Unit	51.494.700	1	Unit	2.831.000	100,00	1,65	1	Unit	2.831.000	1,00	1,65	Adum	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	47,44					100,00	47,44	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	SR					ST	SR	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																												98,59	81,59					98,59	81,59	
Predikat Kinerja Kegiatan																												ST	T					ST	T	

6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Manajemen Risiko	3	Level	5.048.105.660	3	Level	5.048.105.660			269.730.000			1.066.549.600			1.607.599.600	3	Level	2.889.622.800	3	Level	2.889.622.800	100,00	57,24	3	Level	2.889.622.800	100,00	57,24	Urban			
					Persentase IKK sesuai pedoman	100	%		100	%		100	%													100	%		100,00		100	%		100,00		Urban	
					Persentase predikat sapik SKPD minimal B	100	%		100	%		97,77	%													97,77	%		97,77		97,77	%		97,77		Urban	
					Persentase SKPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dari BPK RI	100	%		100	%			%		95,55	%										95,55	%		95,55		95,55	%		95,55		Urban	
					Persentase kematangan manajemen risiko SKPD Minimal Level 3	100	%		100	%			%							100	%					100	%		100,00		100,00	%		100,00		Urban	
					Persentase efektivitas penanganan risiko SKPD	100	%		100	%			%		100	%											100	%		100,00		100,00	%		100,00		Urban
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	100	%	3.545.058.930	100	%	3.545.058.930	73,33	%	132.460.000	77,58	%	727.030.000	77,58	%	1.195.770.000	77,58	%	2.087.383.200	77,58	%	2.087.383.200	77,58	58,88	77,58	%	2.087.383.200	77,58	58,88	Urban			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82	Lap	1.142.005.300	82	Lap	1.142.005.300	3	Lap	14.400.000	13	Lap	243.830.000	33	Lap	511.610.000	82	Lap	980.338.200	82	Lap	980.338.200	100,00	85,84	3	Lap	980.338.200	100,00	85,84	Urban		
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	Lap	686.989.350	40	Lap	686.989.350	6	Lap	18.220.000	14	Lap	129.480.000	36	Lap	254.200.000	40	Lap	504.500.000	40	Lap	504.500.000	100,00	73,44	40	Lap	504.500.000	100,00	73,44	Urban		
6	01	02	2.01	03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	12	Lap	427.271.830	12	Lap	427.271.830	6	Lap		8	Lap	92.990.000	10	Lap	120.530.000	12	Lap	172.650.000	12	Lap	172.650.000	100,00	40,41	12	Lap	172.650.000	100,00	40,41	Urban		
6	01	02	2.01	04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	2	Lap	160.460.280	2	Lap	160.460.280		Lap		1	Lap	6.000.000	1	Lap	6.000.000		Lap	24.540.000	2	Lap	24.540.000	100,00	15,29	2	Lap	24.540.000	100,00	15,29	Urban		
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32	Lap	668.075.240	32	Lap	668.075.240	14	Lap	89.040.000	14	Lap	161.455.000	19	Lap	161.455.000	32	Lap	171.705.000	32	Lap	171.705.000	100,00	25,70	32	Lap	171.705.000	100,00	25,70	Urban		
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	85	Dok	460.256.930	85	Dok	460.256.930	19	Dok	10.800.000	40	Dok	93.275.000	59	Dok	141.975.000	83	Lap	233.650.000	83	Dok	233.650.000	97,65	50,77	83	Dok	233.650.000	97,65	50,77	Evilap		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																										99,61	58,88					99,61	58,88				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																										ST	R					ST	R				
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat yang Ditangani Tepat Waktu	100	%	1.503.046.730	100	%	1.503.046.730	100	%	137.270.000	100	%	339.519.600	100	%	411.829.600			802.239.600	100	%	802.239.600	100,00	53,37	100,00	%	802.239.600	100,00	53,37	Urban			
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Lap	307.702.730	3	Lap	307.702.730		Lap		1	Lap	6.429.600	1	Lap	6.429.600	1	Lap	9.229.600	3	Lap	9.229.600	100,00	3,00		Lap	9.229.600	100,00	3,00	Urban		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	Lap	1.195.344.000	20	Lap	1.195.344.000	1	Lap	137.270.000	11	Lap	333.090.000	17	Lap	405.400.000	19	Lap	793.010.000	19	Lap	793.010.000	95,00	66,34	19	Lap	793.010.000	95,00	66,34	Urban		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																										97,50	53,37					97,50	53,37				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																										ST	R					ST	R				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										98,88	57,24					98,88	57,24				
Predikat Kinerja Kegiatan																										ST	R					ST	R				

6		01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	Level	1.548.080.610	3	Level	1.548.080.610		Level		456.000			64.888.500				128.867.500	2,652	Level		568.513.600	2,652	Level		568.513.600	88,40	36,72	2,652	Level		568.513.600	88,40	36,72	Urban					
							Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materil	100	%		100	%			%			68,88	%						68,88	%						68,88	%			68,88	%			68,88	%		Urban			
							Persentase SKPD yang telah menerapkan mitigasi risiko fraud	100	%		100	%			%															100	%		100	%			100,00		100	%			100,00		Urban	
6	01	03		2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100	%	29.446.770	100	%	29.446.770		%										100	%		4.595.700	100	Level		4.595.700	100,00	15,61	100	Level		4.595.700	100,00	15,61	Sekretaris					
6	01	03	2.01		01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	27.246.020	1	Rekomendasi	27.246.020		Rekomendasi										1	Rekomendasi		2.425.450	1	Rekomendasi		2.425.450	100,00	8,90	1	Rekomendasi		2.425.450	100,00	8,90	Evlap					
6	01	03	2.01		02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	2.200.750	1	Rekomendasi	2.200.750		Rekomendasi										1	Rekomendasi		2.170.250	1	Rekomendasi		2.170.250	100,00	98,61	1	Rekomendasi		2.170.250	100,00	98,61	TU					
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	15,61					100,00	15,61											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	SR					ST	SR											
6	01	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil Pendampingan dan Asistensi yang telah ditindaklanjuti	100	%	1.518.633.840	100	%	1.518.633.840		%		456.000	100	%	64.888.500			128.867.500					563.917.900	100	%		563.917.900	100,00	37,13	100	%		563.917.900	100	37,13	Urban					
6	01	03	2.02		01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	Perangkat Daerah	60.529.060	12	Perangkat Daerah	60.529.060		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah					12	Perangkat Daerah		12.000.000	12	Perangkat Daerah		12.000.000	100,00	19,83	12	Perangkat Daerah		12.000.000	100,00	19,83	Urban							
6	01	03	2.02		02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18	Perangkat Daerah	496.338.820	18	Perangkat Daerah	496.338.820		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		18	Perangkat Daerah	3.600.000		Perangkat Daerah		11.150.000	18	Perangkat Daerah		11.150.000	100,00	2,25	18	Perangkat Daerah		11.150.000	100,00	2,25	Urban							
6	01	03	2.02		03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Keg	881.468.000	5	Keg	881.468.000	1	Keg		456.000	2	Keg	60348000	3	Keg	120.727.000	5	Keg		510.597.400	5	Keg		510.597.400	100,00	57,93	5	Keg		510.597.400	100,00	57,93	Urban						
6	01	03	2.02		04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Perangkat Daerah	80.297.960	6	Perangkat Daerah	80.297.960		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		6	Perangkat Daerah	4540500		Perangkat Daerah		4.540.500		Perangkat Daerah		30.170.500	6	Perangkat Daerah		30.170.500	100,00	37,57	6	Perangkat Daerah		30.170.500	100,00	37,57	Urban			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	37,13					100,00	37,13											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	SR					ST	SR											
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																												85,76	36,72					85,76	36,72											
Predikat Kinerja Kegiatan																												T	SR					T	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										23.328.263.897			2.938.330.444			8.204.680.223			11.785.832.060			17.108.122.422			17.110.323.422			96,00	73,35					96,00	73,35											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																												ST	S					ST	S											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																																														

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA Renja SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin Triwulan II Tahun 2025																																			
No	Kode Anggaran				Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket.			
													I		II		III		IV																
1	2				3	4	5		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 127 x 100		14 = 6+12		15 = 145 x 100		16	17							
6					URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																														
6	01				INSPEKTORAT DAERAH																														
6	01	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Kapabilitas APIP	3	Level	17.519.185.383	3	Level	17.519.185.383		Level	2.856.310.709		6.431.526.749						Level	6.431.526.749	0,00	36,71	0,00	Level	6.431.526.749	0,00	36,71	Sekr				
					Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	85	Nilai		85	Nilai		Nilai										Nilai		0,00		Nilai		0,00			Sekr				
					Persentase APIP yang sesuai kompetensi	100	%		100	%		100	%		100	%							100	%		100,00		100	%		100,00			Sekr	
					Nilai SAKIP Inspektorat	A	Kategori		A	Kategori		Kategori										Kategori				Kategori						Sekr			
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100	%	3.540.800	100	%	3.540.800	100	%								%	-	0,00	0,00	0,00	%	-	0,00	-	Perencanaan					
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	Dok	572.800	2	Dok	572.800		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan				
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dok	558.000	1	Dok	558.000		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan				
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	Dok	558.000	1	Dok	558.000		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan				
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	Dok	298.000	1	Dok	298.000		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan				
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	Dok	298.000	1	Dok	298.000		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan				
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	2	Lap	758.000	2	Lap	758.000		Lap								Lap	-	0,00	0,00	0,00	Lap	-	0,00	-	Perencanaan				
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4	Lap	498.000	4	Lap	498.000		Lap							0,00	Lap	-	0,00	0,00	0,00	Lap	-	0,00	-	Perencanaan				
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		0,00	0,00					0,00	0,00					
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR					SR	SR					
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	%	10.690.257.795	100	%	10.690.257.795	100	%	2.312.301.724	100	%	5.420.279.717				100	%	5.420.279.717	100,00	50,70	100,00	Bin	5.420.279.717	100,00	50,70	Adum				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Org	10.573.667.795	38	Org	10.573.667.795	38	Org	2.302.401.724	38	Org	5.399.593.717				38	Org	5.399.593.717	100,00	51,07	38,00	Org	5.399.593.717	100,00	51,07	Adum			
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	106.400.000	12	Dok	106.400.000		3	Dok	6.600.000	6	Dok	16.500.000				6	Dok	16.500.000	50,00	15,51	6,00	Dok	16.500.000	50,00	15,51	Adum		
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1	Lap	5.195.000	1	Lap	5.195.000		1	Lap	3.300.000	1	Lap	4.186.000				1	Lap	4.186.000	100,00	80,58	1,00	Lap	4.186.000	100,00	80,58	Adum		
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan	1	Dok	4.995.000	1	Dok	4.995.000		Dok							0	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	0,00	Adum				
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		83,33	50,70					83,33	50,70					
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		T	SR					T	SR					
6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	3.247.200	100	%	3.247.200		%								%	-	0,00	0,00	0	%	-	0,00	0,00	Adum					
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	3.247.200	1	Lap	3.247.200		Lap								Lap	-	0,00	0,00	0	Lap	-	0,00	0,00	Adum				
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		0,00	0,00					0,00	0,00					
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR					SR	SR					

6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawalan tepat waktu	100	%	3.923.075.340	100	%	3.923.075.340	100	%	111.800.000	100	%	189.486.500													100	%	189.486.500	100,00	4,83	100	Bln	189.486.500	100,00	4,83	Adum			
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38	Paket	86.873.500	38	Paket	86.873.500		Paket																	Paket		0,00	0,00	0	Paket	-	0,00	0,00	Adum			
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	38	Dok	83.678.400	38	Dok	83.678.400	38	Dok	13.800.000	38	Dok	34.500.000												38	Dok	34.500.000	100,00	41,23	38	Dok	34.500.000	100,00	41,23	Adum			
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38	Org	2.434.845.700	38	Org	2.434.845.700	8	Org	68.200.000	27	Org	123.610.000												27	Org	123.610.000	71,05	5,08	27	Org	123.610.000	71,05	5,08	Adum			
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38	Org	1.317.677.740	38	Org	1.317.677.740	4	Org	29.800.000	5	Org	31.376.500												5	Org	31.376.500	13,16	2,38	5	Org	31.376.500	13,16	2,38	Adum			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												46,05	4,83					46,05	4,83								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												SR	SR					SR	SR								
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100	%	1.994.893.590	100	%	1.994.893.590	100	%	392.517.527	100	%	708.717.832													100	%	708.717.832,00	100,00	35,53	100,00	%	708.717.832	100,00	35,53	Adum			
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	34.615.400	2	Paket	34.615.400		Paket		1	Paket	9.315.000												1	Paket	9.315.000	50,00	26,91	1	Paket	9.315.000	50,00	26,91	Adum			
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	103.921.600	12	Paket	103.921.600	3	Paket	850.000	6	Paket	27.404.422												6	Paket	27.404.422	50,00	26,37	6	Paket	27.404.422	50,00	26,37	Adum			
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	Paket	9.908.900	12	Paket	9.908.900	3	Paket	809.500	6	Paket	7.930.620												6	Paket	7.930.620	50,00	80,04	6	Paket	7.930.620	50,00	80,04	Adum			
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	618.749.540	12	Paket	618.749.540	3	Paket	25.200.000	6	Paket	55.727.865												6	Paket	55.727.865	50,00	9,01	6	Paket	55.727.865	50,00	9,01	Adum			
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	60.953.200	12	Paket	60.953.200	3	Paket	5.900.050	6	Paket	12.411.400												6	Paket	12.411.400	50,00	20,36	6	Paket	12.411.400	50,00	20,36	Adum			
6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Lap	61.054.300	12	Lap	61.054.300	3	Lap	5.224.300	6	Lap	16.545.300												6	Lap	16.545.300	50,00	27,10	6	Lap	16.545.300	50,00	27,10	Adum			
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	1.105.690.650	12	Lap	1.105.690.650	3	Lap	354.533.677	6	Lap	579.383.225												6	Lap	579.383.225	50,00	52,40	6	Lap	579.383.225	50,00	52,40	Adum			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												50,00	35,53					50,00	35,53								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												SR	SR					SR	SR								
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100	%	204.275.360	100	%	204.275.360		%																0	%	0,00	0,00	0,00	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adum		
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	65	Paket	161.643.860	65	Paket	161.643.860		Paket																	Paket	0,00	0,00	0,00	0	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adum	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	15	Unit	42.631.500	15	Unit	42.631.500		Unit																	Unit	0,00	0,00	0,00	0	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adum	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												0,00	0,00					0,00	0,00								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												SR	SR					SR	SR								
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	236.252.180	100	%	236.252.180	100	%	19.573.360	100	%	51.139.424													100	%	51.139.424	100,00	21,65	100	%	51.139.424	100,00	21,65	Adum			
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	154.080.680	12	Lap	154.080.680	3	Lap	9.961.000	6	Lap	27.822.944												6	Lap	27.822.944	50,00	18,06	6	Lap	27.822.944	50,00	18,06	Adum			
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	82.171.500	12	Lap	82.171.500	3	Lap	9.612.360	6	Lap	23.316.480												6	Lap	23.316.480	50,00	28,38	6	Lap	23.316.480	50,00	28,38	Adum			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												50,00	21,65					50,00	21,65								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												SR	SR					SR	SR								
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100	%	463.643.118	100	%	463.643.118	90,13	%	20.118.098	88,54	%	61.903.276													88,54	%	61.903.276	88,54	13,35	88,54	%	61.903.276	88,54	13,35	Adum			
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	108.753.550	1	Unit	108753950		Unit	1	Unit	1.803.925	1	Unit	7.234.103										1	Unit	7.234.103	100,00	6,65	1	Unit	7.234.103	100,00	6,65	Adum			
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	217.791.800	10	Unit	217.791.800	2	Unit	4.435.053	3	Unit	5.415.053												3	Unit	5.415.053	30,00	2,49	3	Unit	5.415.053	3,00	2,49	Adum			
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	51.606.568	80	Unit	51.606.568	10	Unit	2.152.120	25	Unit	16.809.120												25	Unit	16.809.120	31,25	32,57	25	Unit	16.809.120	25,00	32,57	Adum			
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	85.491.200	1	Unit	85.491.200	1	Unit	11.727.000	1	Unit	32.445.000												1	Unit	32.445.000	100,00	37,95	1	Unit	32.445.000	1,00	37,95	Adum			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												65,31	13,35					65,31	13,35								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												R	SR					R	SR								
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																												73,76	36,71					73,76	36,71								
Predikat Kinerja Kegiatan																												S	SR					S	SR								

6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Penjamin Kualitas SPJP	4,000	Level	5.497.041.270	4,000	Level	5.497.041.270		Level	232.392.000		Level	1.064.047.000								0	Level	232.392.000		4,23	0	Level	232.392.000	0,00	4,23	Irban	
						Persentase IKK sesuai pedoman	100	%		100	%		100	%												100	%		100,00		100	%		100,00		Irban	
						Persentase predikat saki SKPD minimal A	100	%		100	%			%													%		0,00		0	%		0,00		Irban	
						Persentase SKPD yang telah menyusun RTP/ Risk Register Strategis dan Operasional	100	%		100	%		100	%												100	%		100,00		100	%		100,00		Irban	
						Persentase komponen laporan keuangan yang disajikan sesuai SAP	100	%		100	%		100	%												100	%		100,00		100	%		100,00		Irban	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	100	%	4.354.317.340	100	%	4.354.317.340	77,58	%	171.960.000	88,23	%	838.895.000								88,23	%	838.895.000	88,23	19,27	88,23	%	838.895.000	88,23	19,27	Irban	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82	Lap	1.574.994.260	82	Lap	1.574.994.260	11	Lap	75.440.000	23	Lap	335.890.000								23	Lap	335.890.000	28,05	21,33	11	Lap	335.890.000	28,05	21,33	Irban	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	Lap	734.636.950	40	Lap	734.636.950	8	Lap	74.250.000	16	Lap	181.400.000								16	Lap	181.400.000	40,00	24,69	16	Lap	181.400.000	40,00	24,69	Irban	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	47	Lap	469.911.830	47	Lap	469.911.830		Lap		1	Lap	16.100.000								1	Lap	16.100.000	2,13	3,43	1	Lap	16.100.000	2,13	3,43	Irban	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	Lap	226.600.280	2	Lap	226.600.280		Lap		1	Lap	34.200.000								1	Lap	34.200.000	50,00	15,09	1	Lap	34.200.000	50,00	15,09	Irban	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32	Lap	750.783.690	32	Lap	750.783.690		Lap		6	Lap	111.820.000								6	Lap	111.820.000	18,75	14,89	6	Lap	111.820.000	18,75	14,89	Irban	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	48	Dok	597.390.330	48	Dok	597.390.330	14	Dok	22.270.000	26	Dok	159.485.000								26	Dok	159.485.000	54,17	26,70	26	Dok	159.485.000	54,17	26,70	Evlap	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																											32,18	19,27				32,18	19,27				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																											SR	SR				SR	SR				
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100	%	1.142.723.930	100	%	1.142.723.930	100	%	60.432.000	100	%	225.152.000								100	%	225.152.000	100,00	19,70	100	%	225.152.000	100,00	19,70	Irban	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Lap	270.179.930	1	Lap	270.179.930		Lap			Lap									Lap			0,00		Lap	-		0,00	Irban		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16	Lap	872.544.000	16	Lap	872.544.000	2	Lap	60.432.000	6	Lap	225.152.000								6	Lap	225.152.000	37,50	25,80	6	Lap	225.152.000	37,50	25,80	Irban	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																											37,50	19,70				37,50	19,70				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																											SR	SR				SR	SR				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																											88,79	4,23				88,79	4,23				
Predikat Kinerja Kegiatan																											T	SR				T	SR				

6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	Level	1.710.333.280	3	Level	1.710.333.280		Level	-	Level	158.655.800							Level	-	0,00	0,00	0	Level	-	0,00	0,00	Irban		
						Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan dan asistensi serta evaluasi pembangunan zona integritas unit pelayanan yang diselesaikan	100	%		100	%			%		100	%							100	%		100,00		100	%		100,00		Irban	
						Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi serta evaluasi pelaksanaan reformasi yang ditindaklanjuti	100	%		100	%			%		100	%							100	%		100,00		100	%		100,00		Irban	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100	%	29.404.020	100	%	29.404.020		%		100	%	5.020.000						100	%	5.020.000	100,00	17,07	100	%	5.020.000	100,00	17,07	Sekretaris	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	27.246.020	1	Rekomendasi	27.246.020		Rekomendasi		1	Rekomendasi	5.020.000						1	Rekomendasi	5.020.000	100,00	18,42	1	Rekomendasi	5.020.000	100,00	18,42	Evlap	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	2.158.000	1	Rekomendasi	2.158.000		Rekomendasi			Rekomendasi							Rekomendasi	-		0,00	0	Rekomendasi	-	0,00	0,00	TU		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								50,00	17,07				50,00	17,07					
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								SR	SR				SR	SR					
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%	1.680.929.260	100	%	1.680.929.260		%	-	100	%	153.635.800						100	%	153.635.800	100,00	9,14	100	%	153.635.800	100	9,14	Irban	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45	Perangkat Daerah	138.593.060	45	Perangkat Daerah	138.593.060		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah							Perangkat Daerah			0,00		Perangkat Daerah	0	100,00	0,00	Irban		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45	Perangkat Daerah	190.032.000	45	Perangkat Daerah	190.032.000		Perangkat Daerah		45	Perangkat Daerah	50.650.000						45	Perangkat Daerah	50.650.000	100,00	26,65	45	Perangkat Daerah	50.650.000	100,00	26,65	Irban	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Keg	1.107.265.200	5	Keg	1.107.265.200		Keg		2	Keg	64.125.800						2	Keg	64.125.800	40,00	5,79	2	Keg	64.125.800	40,00	5,79	Irban	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3	Perangkat Daerah	245.039.000	3	Perangkat Daerah	245.039.000		Perangkat Daerah		3	Perangkat Daerah	38.860.000						3	Perangkat Daerah	38.860.000		15,86		Perangkat Daerah	38.860.000		15,86	Irban	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								70,00	9,14				70,00	9,14					
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								S	SR				S	SR					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																								0,00	0,00				0,00	0,00					
Predikat Kinerja Kegiatan																								SR	SR				SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									24.726.559.933		3.088.702.709				7.654.229.549									7.654.229.549											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																								50,00	30,96				50,00	30,96					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																								SR	SR				SR	SR					

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD Inspektorat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SOPD Inspektorat. Keberhasilan kinerja SOPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SOPD Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel T-C.30
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci SKPD Inspektorat
Kabupaten Tapin

NO	INDIKATOR	TARGET				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	Proyeksi 2025-2026 memakai angka target
2	Indeks Maturitas SPIP	3	3	3	3	3,013	3,158	3	3	Pproyeksi 2025-2026 memakai angka target

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan dan Pemetaan Risiko Korupsi	Survei Penilaian Integritas	Hasil Survei Penilaian Integritas oleh KPK	Laporan Survei Penilaian Integritas oleh KPK	Inspektur
	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	LHP Maturitas SPIP oleh BPKP	Inspektur
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN	Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh MenpanRB	LHE Zona Integritas oleh MenpanRB	Inspektur
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah oleh MenpanRB	LHE SAKIP oleh MenpanRB	Inspektur
		Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi LPPD oleh Kemendagri	SK Mendagri tentang Hasil Evaluasi LPPD	Inspektur
		Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI	Opini Laporan Keuangan Oleh BPK	LHP atas Laporan Keuangan Pemda oleh BPK	Inspektur

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Rencana Aksi yang sesuai dengan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi Seluruh Jumlah Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikali 100%	LHE Internal Reformasi Birokrasi	Inspektur
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Realisasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikali 100%	LHE Internal Reformasi Birokrasi	Inspektur

Capaian sasaran strategis Inspektorat Tahun 2024:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	3	3	100
2	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN	100%	100%	100
3	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Minimal BB	BB	100
		Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100
		Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI	WTP	WTP	100
4	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	100%	100
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	87,92%	87,92
Rata-rata capaian sasaran strategis					98.27%

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja Inspektorat, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Inspektorat sebagai berikut:

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah;
2. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;



3. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan;
4. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Inspektorat berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:



REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2026

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tapin	Level Kapabilitas APIP	Level 3	16.553.312.658	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tapin	Level Kapabilitas APIP	Level 3	16.553.312.658	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100	4.026.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100	4.026.800.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	525.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	525.800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	511.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	511.000	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	511.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	511.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	531.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	531.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	531.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	531.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	813.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	813.000	

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	604.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	604.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	9.929.259.708	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	9.929.259.708	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	9.792.050.708	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	9.792.050.708	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	106.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	106.400.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.501.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.501.000	
4	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	20.057.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	20.057.000	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tapin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.251.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tapin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.251.000	

III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	3.268.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	3.268.400	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	3.268.400	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	3.268.400	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	1.861.771.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	1.861.771.800	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39	72.592.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39	72.592.500	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	39	83.676.400	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	39	83.676.400	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tapin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39	1.392.198.100	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tapin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39	1.392.198.100	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	39	313.304.800	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	39	313.304.800	

			Undangan					Undangan			
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100	3.034.551.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100	3.034.551.400	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	65.541.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	65.541.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	137.781.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	137.781.500	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	15.740.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	15.740.600	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	467.903.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	467.903.203	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	86.772.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	86.772.300	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	80.818.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	80.818.800	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2.180.021.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2.180.021.000	

VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100	1.027.644.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100	1.027.644.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	363.185.500	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	363.185.500	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Unti Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	654.335.500	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Unti Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	654.335.500	
3	Pengadaan Mebel	Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	93.018.000	Pengadaan Mebel	Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	93.018.000	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	355.291.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	355.291.600	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	369.791.480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	369.791.480	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	134.771.480	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	134.771.480	

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	235.020.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	235.020.000	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	322.999.070	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	322.999.070	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	58.405.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	58.405.300	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	75.304.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	75.304.600	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	85.645.770	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	85.645.770	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	103.643.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	103.643.400	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tapin	Nilai Penjaminan Kualitas SPIP	4	4.663.564.310	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tapin	Nilai Penjaminan Kualitas SPIP	4	4.663.564.310	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tapin	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar	100	3.729.934.310	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tapin	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar	100	3.729.934.310	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82	1.569.983.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82	1.569.983.000	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	845.775.500	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	845.775.500	
3	Reviu Laporan Kinerja	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	47	215.662.500	Reviu Laporan Kinerja	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	47	215.662.500	
4	Reviu Laporan Keuangan	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	70.554.500	Reviu Laporan Keuangan	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	70.554.500	
5	Pengawasan Desa	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32	214.054.500	Pengawasan Desa	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32	214.054.500	
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	48	813.904.310	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	48	813.904.310	

			Pemeriksaan APIP					Pemeriksaan APIP			
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tapin	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100	933.630.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tapin	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100	933.630.000	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	167.900.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	167.900.000	
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	765.730.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	765.730.000	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tapin	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pendampingan dan Asistensi	100	547.915.020	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tapin	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	100	547.915.020	
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tapin	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100	29.261.520	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tapin	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100	29.261.520	

1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	27.342.020	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	27.342.020	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1	1.919.500	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1	1.919.500	
II	Pendampingan dan Asistensi	Tapin	Jumlah SKPD yang mengusulkan predikat WBK hingga TPN	3	518.653.500	Pendampingan dan Asistensi	Tapin	Jumlah SKPD yang mengusulkan predikat WBK hingga TPN	3	518.653.500	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45	12.160.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45	12.160.000	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45	141.885.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45	141.885.000	

3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tapin	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	191.565.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tapin	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	191.565.000	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	173.043.500	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	173.043.500	
					22.202.978.588					22.202.978.588	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2026, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SOPD Inspektorat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tapin

Nama SOPD: SOPD INSPEKTORAT

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Inspektorat selama tahun 2026 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kabupaten Tapin harus mampu mendukung dan sejalan dengan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Nasional). Tema RKP 2026 “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Penguatan Ekonomi Produktif dan Inklusif”

Fokus Utama RKP 2026:

1. Penguatan Fondasi Ekonomi Daerah
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pemerataan Akses Terhadap Layanan Dasar

Prioritas Pembangunan RKP 2026

1. Kedaulatan Pangan dan Energi

Kedaulatan Pangan dan Energi meliputi kedaulatan pangan, energi, air, dan pengelolaan sampah.

2. Ekonomi Produktif dan Inklusif

Ekonomi Produktif dan Inklusif meliputi pendidikan dan kesehatan, deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan, serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan kemiskinan.

Target Pembangunan RKP 2026:

1. Pertumbuhan Ekonomi (5,8% hingga 6,3%)



2. Penurunan Kemiskinan (Penurunan tingkat kemiskinan ekstrim)
3. Peningkatan Kualitas SDM (Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan)

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian wilayah Kabupaten Tapin yang berada didalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keberhasilan pembangunan dari daerah Kab/Kota. Dengan berdasarkan permasalahan dan isu yang berkembang saat ini Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional”.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan daerah tersebut ke dalam 5 prioritas daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya
 - 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan akademik dan evokasi
 - 2) Peningkatan akses dan kualitas sarana, prasarana dan layanan kesehatan
 - 3) Peningkatan prestasi olahraga dan kepemudaan
 - 4) Penurunan prevalensi sunting
 - 5) Pelestarian budaya
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan
 - 1) Peningkatan akses pelayanan infrastruktur dasar berbasis kewilayahan
 - 2) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dan pendukung konduktivitas antar wilayah berbasis kewilayahan
 - 3) Pengembangan Moeda transportasi massal
3. Peningkatan Sektor Unggulan (Indistri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing dan Energi Berkelanjutan
 - 1) Peningkatan Investasi Berdampak Pada Daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri
 - 2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian untuk Mendukung Hilirisasi Industri
 - 3) Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan
 - 4) Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing



- 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berdaya saing
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi Serta Penanganan Bencana
 - 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 - 2) Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik
 - 1) Penguatan Reformasi Birokrasi
 - 2) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
 - 3) Pengembangan Satu Data Kalsel

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Inspektorat selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Inspektorat pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2026 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tujuan dan Sasaran Inspektorat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran (Impac)	Baseline	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai SAKIP	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70
			Nilai LPPD	2,76	2,82	2,88	2,94	3,00	3,06	3,11
			Nilai RB General	66,98	67,53	68,07	68,62	69,187	70,26	70,28
			Nilai RB Tematik	9,29	9,37	9,44	9,52	9,59	9,67	9,75
	Meningkatnya birokrasi yang berintegritas		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP KPK	89	89,52	90,05	90,57	91,10	91,62	92,14
			Indeks Maturitas SPIP	3,15	3,25	3,34	3,24	3,51	3,60	3,69
			Survei Penilaian Integritas	72,47	73,78	75,09	76,40	77,71	79,02	80,34
		Meningkatnya nilai sakip perangkat daerah	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP minimal A	33,33	90	92	94	96	98	100
		Meningkatnya kualitas IKK LPPD di Perangkat Daerah	Persentase IKK sesuai pedoman	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Persentase ketepatan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase capaian target rencana aksi reformasi birokrasi	87,92	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya nilai capaian area MCP KPK	Persentase pemenuhan dokumen MCP sesuai pedoman	89	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya nilai penjaminan kualitas maturitas SPIP	Nilai penjaminan kualitas SPIP	4,29	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	4,55
		Meningkatnya penyusunan kebijakan anti korupsi	Persentase kebijakan anti korupsi yang ditetapkan sesuai rencana	100	100	100	100	100	100	100

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2026 beserta prognosisnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Reviu Laporan Kinerja
- d. Reviu Laporan Keuangan
- e. Pengawasan Desa
- f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

C. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

12. Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Inspektorat TAHUN 2026

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										REKAPITULASI BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tapin Tahun Anggaran 2026										

Organisasi : Inspektorat

Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Inspektorat														
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01				INSPEKTORAT DAERAH									
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Rp. 4.663.564.310,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.663.564.310,00	Rp. 5.497.041.270,00	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Rp. 3.729.934.310,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.729.934.310,00	Rp. 4.354.317.340,00	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung	Rp. 1.569.983.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.569.983.000,00	Rp. 1.574.994.260,00	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung	Rp. 845.775.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 845.775.500,00	Rp. 734.636.950,00	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung	Rp. 215.662.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 215.662.500,00	Rp. 469.911.830,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung	Rp. 70.554.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 70.554.500,00	Rp. 226.600.280,00	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung	Rp. 214.054.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 214.054.500,00	Rp. 750.783.690,00	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung	Rp. 813.904.310,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 813.904.310,00	Rp. 597.390.330,00	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Rp. 933.630.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 933.630.000,00	Rp. 1.142.723.930,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 167.900.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 167.900.000,00	Rp. 270.179.930,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 765.730.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 765.730.000,00	Rp. 872.544.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Rp. 547.915.020,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 547.915.020,00	Rp. 1.707.071.280,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				Rp. 29.261.520,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 29.261.520,00	Rp. 29.404.020,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 27.342.020,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 27.342.020,00	Rp. 27.246.020,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 1.919.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.919.500,00	Rp. 2.158.000,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi				Rp. 518.653.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 518.653.500,00	Rp. 1.677.667.260,00
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 12.160.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.160.000,00	Rp. 138.593.060,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 141.885.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 141.885.000,00	Rp. 190.032.000,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 191.565.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 191.565.000,00	Rp. 1.107.265.200,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 173.043.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 173.043.500,00	Rp. 241.777.000,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 16.553.312.658,00	Rp. 438.186.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 16.991.499.258,00	Rp. 19.084.507.883,00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 4.026.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.026.800,00	Rp. 3.540.800,00
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 525.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 525.800,00	Rp. 656.000,00
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 511.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 511.000,00	Rp. 656.000,00
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 511.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 511.000,00	Rp. 376.800,00
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 531.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 531.000,00	Rp. 298.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 531.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 531.000,00	Rp. 298.000,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 813.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 813.000,00	Rp. 758.000,00
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 604.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 604.000,00	Rp. 498.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 9.929.259.708,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.929.259.708,00	Rp. 10.693.473.295,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 9.792.050.708,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.792.050.708,00	Rp. 10.573.621.295,00
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 106.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 106.400.000,00	Rp. 106.400.000,00
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 5.501.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.501.000,00	Rp. 5.195.000,00
6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 20.057.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.057.000,00	Rp. 3.262.000,00
6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 5.251.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.251.000,00	Rp. 4.995.000,00
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 3.268.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.268.400,00	Rp. 3.247.200,00
6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 3.268.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.268.400,00	Rp. 3.247.200,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 1.861.771.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.861.771.800,00	Rp. 3.923.075.340,00
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 72.592.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.592.500,00	Rp. 86.873.500,00
6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 83.676.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 83.676.400,00	Rp. 83.678.400,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 1.392.198.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.392.198.100,00	Rp. 2.434.845.700,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 313.304.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 313.304.800,00	Rp. 1.317.677.740,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 3.034.551.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.034.551.400,00	Rp. 2.942.000.590,00
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 65.514.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 65.514.000,00	Rp. 34.615.400,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 137.781.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 137.781.500,00	Rp. 103.921.600,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 15.740.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.740.600,00	Rp. 9.908.900,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 467.903.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 467.903.200,00	Rp. 618.749.540,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 86.772.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 86.772.300,00	Rp. 60.953.200,00
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 80.818.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 80.818.800,00	Rp. 61.054.300,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 2.180.021.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.180.021.000,00	Rp. 2.052.797.650,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 1.027.644.000,00	Rp. 438.186.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.465.830.600,00	Rp. 819.275.360,00
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 363.185.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 363.185.500,00	Rp. 100.000.000,00
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 654.335.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 654.335.500,00	Rp. 515.000.000,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 2.651.500,00	Rp. 90.366.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 93.018.000,00	Rp. 161.643.860,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 7.471.500,00	Rp. 347.820.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 355.291.600,00	Rp. 42.631.500,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 369.791.480,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 369.791.480,00	Rp. 236.252.180,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 134.771.480,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 134.771.480,00	Rp. 154.080.680,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 235.020.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 235.020.000,00	Rp. 82.171.500,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 322.999.070,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 322.999.070,00	Rp. 463.643.118,00
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 58.405.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 58.405.300,00	Rp. 108.753.550,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 75.304.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.304.600,00	Rp. 217.791.800,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 85.645.770,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 85.645.770,00	Rp. 51.606.568,00
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rangda Malingkung		Rp. 103.643.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 103.643.400,00	Rp. 85.491.200,00
Jumlah									Rp. 21.764.791.988,00	Rp. 438.186.600,00			Rp. 22.202.978.588,00	Rp. 26.288.620.433,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan		Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.553.312.658
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.560.850
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	539.100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	539.100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	539.100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	268.200
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	268.200
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	926.100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	481.050
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.929.259.708
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.792.050.708
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.400.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.501.000
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.057.000
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.251.000



III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.268.400
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.268.400
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.861.771.800
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	72.592.500
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	83.676.400
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.392.198.100
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	313.304.800
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.034.551.400
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.541.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.781.500
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.740.600
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	467.903.200
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.772.300
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	80.818.800
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.180.021.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.027.644.000
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	363.185.500
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	654.335.500
3	Pengadaan Mebel	93.018.000
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.291.600
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.791.480
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.771.480
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.020.000
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	322.999.070
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.405.300
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.304.600
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.645.770
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.643.400
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.663.564.310
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.729.934.310
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.569.983.000
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	845.775.500



3	Reviu Laporan Kinerja	215.662.500
4	Reviu Laporan Keuangan	70.554.500
5	Pengawasan Desa	214.054.500
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	813.904.310
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	933.630.000
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	167.900.000
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	765.730.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	547.915.020
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	29.261.520
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	27.342.020
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.919.500
II	Pendampingan dan Asistensi	518.653.500
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12.160.000
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	141.885.000
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	191.565.000
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	173.043.500
		22.202.978.588



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapin dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2029.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah.

